

WARTA BKP

B A D A N K E T A H A N A N P A N G A N

KEPALA BKP KEMENTAN :

Jelaskan Strategi Meningkatkan Daya Saing Pertanian



Direktur Bank Dunia
untuk Asia Pasifik
Tawarkan Kerjasama
dengan Indonesia



Dorong Perum Bulog
Subdivre Subang dan
Subdivre Indramayu
Tingkatkan Serapan Gabah



Kemitraan Gapoktan
dan TTI Mudahkan
Masyarakat Penuhi
Kebutuhan Pangan



JUMLAH GPOKTAN PEMASOK TTI TAHUN 2016-2018



- 7 Gapoktan Tahap Penumbuhan Tahun 2016 kembalikan dana bantuan pemerintah ke kas Negara karena mengundurkan diri (3 Gapoktan Provinsi Kepri, 2 Gapoktan Provinsi Kalsel dan 2 Gapoktan Provinsi Sulut)
- 8 Gapoktan tidak mencairkan dana bantuan pemerintah karena tidak memenuhi syarat masuk Tahap Pengembangan (1 Gapoktan Provinsi Sumbar, 2 Gapoktan Provinsi Bengkulu, 1 Gapoktan Provinsi Kalteng, 1 Gapoktan Provinsi Sulsel, 2 Gapoktan Provinsi Sultra, 1 Gapoktan Provinsi Malut)
- 243 Gapoktan tidak menerima dana bantuan pemerintah karena hanya dialokasikan untuk 250 Gapoktan yang masuk Tahap Pembinaan



**BADAN KETAHANAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**



BKPKEMENTAN



@BKPKementan



badanketahananpangan



BKP Kementan

SAMBUTAN KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN



Badan Ketahanan Pangan terus menggelorakan percepatan diversifikasi pangan, baik di dalam maupun di luar negeri. Pada forum-forum global misalnya, pada Agustus lalu berpartisipasi aktif dalam internasional forum, bahkan memimpin delegasi RI pada World Food Summit 2018 dan Billateral Meeting dengan Direktur World Bank untuk Asia Timur dan Asia Pasifik di Copenhagen, Denmark.

Sementara itu, di dalam negeri, Badan Ketahanan Pangan mempunyai hajatan besar, yaitu menyelenggarakan Pameran Gelar Pangan Nusantara (GPN) untuk ketiga kalinya yang dilaksanakan pada 27 - 29 Juli 2018 di Jakarta.

Kalau biasanya GPN dilakukan di daerah, kali ini penyelenggaraannya di Jakarta, dengan tujuan untuk mensosialisasikan potensi pangan lokal nusantara bagi warga ibukota. Selain itu, tentu saja untuk efisiensi, karena di dalam event tersebut juga digelar rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan, dan rapat evaluasi serta pemantapan program.

Acara ini terbilang sukses, baik dari sisi penyelenggaraan, kepesertaan maupun jumlah pengunjung. Hal ini bisa dilihat antusiasme peserta dan pengunjung, yang terus membludag sampai hari terakhir. Selain menampilkan keberagaman potensi pangan lokal, juga diisi dengan Talkshow dan Penandatanganan kesepakatan untuk mengembangkan pangan lokal.

Selain itu percepatan diversifikasi pangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) juga terus ditingkatkan. Sajian berikutnya dalam edisi ini masih berkisar pada percepatan serap gabah petani untuk mengisi cadangan beras pemerintah di gudang-gudang Bulog serta program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) melalui instrumen Toko Tani Indonesia.

Beberapa kegiatan lain yang disajikan dalam "Warta BKP" edisi ini diharapkan bisa memberikan informasi dan pemahaman yang lebih baik lagi terhadap isu-isu masalah pangan.

Apa yang dilakukan BKP, tentunya diharapkan dapat berkontribusi dalam mengakselerasi memantapkan pembangunan ketahanan pangan nasional seperti yang diharapkan.

Agung Hendriadi

Sekretariat Redaksi :

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha, Bagian Umum,
Badan Ketahanan Pangan
Gedung E lantai 4 ruang 420
Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan
Pasar Minggu Jakarta 12550

Telp. (021) 7805035
Fax. (021) 78846536
Email : bkphumas.kemtan@gmail.com
Website : bkp.pertanian.go.id

DAFTAR ISI

EDISI 4 2018

Kepala BKP Kementan Jelaskan Strategi Meningkatkan Daya Saing Pertanian	4
BKP Kementan Bahas Masalah Pangan dan Gizi Bersama FAO dan WFP	6
Direktur Bank Dunia untuk Asia Pasifik Tawarkan Kerjasama dengan Indonesia	7
Kepala BKP Kementan Pimpin Delegasi RI dalam World Food Summit 2018 di Copenhagen	8
Gelar Pangan Nusantara Momentum Kembangkan Pangan Lokal Indonesia	9
Gelar Pangan Nusantara Untuk Bangkitkan Potensi Pangan Lokal	10
Bangka Belitung Gaungkan Diversifikasi Pangan	11
BKP Kementan Keamanan Pangan Harus Menjadi Perhatian Semua Pihak	12
Kepala BKP Kementan "Perwujudan Ketahanan Pangan Tugas Seluruh Komponen Bangsa"	13
Cadangan Beras Banyak, Untuk Apa Impor Beras?	15
BKP Kementan Dorong Perum Bulog Subdivre Subang dan Subdivre Indramayu Tingkatkan Serapan Gabah	16
Kepala BKP Kementan Dorong Bulog Kalsel dan Sulteng Percepat Serap gabah petani	18
Jelang Panen Raya di Sulsel, Kepala BKP Kementan: Optimalkan Serap Gabah Petani	20
Kepala BKP Kementan Pimpin Rakor Sergap di Sumatera Selatan	21
Kemitraan Gapoktan dan TTI Mudahkan Masyarakat Penuhi Kebutuhan Pangan	22
KRPL Kementan Mampu Penuhi Kebutuhan Pangan dan Kesejahteraan Keluarga	24
KRPL Kementan Hemat Pengeluaran Rumah Tangga	26



Kepala BKP Kementan Jelaskan Strategi Meningkatkan Daya Saing Pertanian

Kota Yogyakarta- Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi menjadi keynote speaker pada acara **an International on Food, Agriculture, and Natural Resources Conference (FANRes)** yang diselenggarakan di Ballroom Cavinton Hotel, Yogyakarta, Kamis (13/09).

Pelaksanaan FANRes diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan tujuan untuk mengembangkan produk pertanian melalui pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan dan peningkatan daya saing produk pertanian melalui



pengembangan agro-technopreneurship.

Mengawali acara, Agung menyampaikan tantangan pangan baik tingkat global maupun nasional. Populasi penduduk global hampir mencapai 2 kali lipat selama 5 dekade terakhir. Jumlahnya diperkirakan mencapai 9,73 milyar pada tahun 2050 dan 11,2 milyar tahun 2100.

"Jika jumlah penduduk dunia meningkat, permintaan pangan akan meningkat. jika masalah ini tidak ditangani dengan benar maka krisis pangan dunia bisa saja terjadi di masa depan," ujar Agung.

“ Tahun 2010 penduduk yang tinggal di perkotaan 44%, BPS memprediksi pada tahun 2030 akan mencapai 60% lebih. artinya apa, kedepan kecenderungan permintaan pangan olahan dari sumber protein hewani, buah dan sayur akan meningkat. dan konsekuensinya adalah kita harus meningkatkan daya saing produk pertanian ”

Perkembangan jumlah penduduk di Indonesia juga mirip dengan dunia global. Hal ini ditandai dengan meningkatnya populasi penduduk tahun 2010.

Berdasarkan Sensus Nasional jumlah penduduk 2010 mencapai 237 juta atau telah meningkat empat kali lipat selama 3 dekade terakhir dengan diiringi urbanisasi dari desa ke kota.

"Tahun 2010 penduduk yang tinggal di perkotaan 44%, BPS memprediksi pada tahun 2030 akan mencapai 60% lebih. artinya apa, kedepan kecenderungan permintaan pangan olahan dari sumber protein hewani, buah dan sayur akan meningkat. dan konsekuensinya adalah kita harus meningkatkan daya saing produk pertanian," jelas Agung.

Global competitive index tahun 2018 menempatkan Indonesia pada ranking 36 dari 137 Negara, masih diatas Vietnam (55) namun bersaing ketat dengan Thailand (32). Sedangkan daya saing pertanian nasional berbeda-beda antar wilayah. Wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi memiliki tingkat daya saing paling tinggi di dibandingkan lokasi lainnya.

"Kita lakukan 5 strategi untuk meningkatkan daya saing pertanian. pertama: efisiensi transportasi dan logistik, kedua: pemberdayaan kelembagaan petani, ketiga: peningkatan efisiensi produksi, keempat: perbaikan infrastruktur, dan kelima: edukasi sum-

berdaya manusia". (jelas Agung).

Berbagai upaya terobosan yang telah dilakukan Kementerian Pertanian untuk Peningkatan Daya Saing rupanya membuahkan hasil positif. Berdasarkan data BPS Ekspor Indonesia tahun 2017 mencapai 168.828 juta dollar, dimana 90,67%-nya berasal dari non migas (pertanian, industri pengolahan, dan pertambangan lainnya). Komoditas pemberi sumbangan terbesar adalah industri minyak sawit dan kopi. Komoditas lain seperti beras, bawang merah, jagung, dan cabai memiliki peluang besar untuk peningkatan ekspor.

Total ekspor pertanian selama tahun 2013-2017 sebesar Rp. 1.875 trilyun atau meningkat 24%. investasi pertanian juga sebesar 14,2% per tahun sejak 2013 hingga 2017.

Dalam konferensi tersebut, Agung yang didampingi Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan juga mengajak seluruh narasumber dan peserta dari Jepang, Korea Selatan, Australia, Inggris, Malaysia, mahasiswa dan perwakilan universitas negeri dan swasta dari berbagai wilayah di Indonesia untuk bersama-sama meningkatkan daya saing pertanian baik lingkup global dan nasional.

"Dengan potensi dan sumberdaya yang dimiliki, saya yakin kita mampu meningkatkan daya saing pertanian kita," pungkas Agung. ●



BKP Kementan

Bahas Masalah Pangan dan Gizi Bersama FAO dan WFP

Pembangunan pertanian sangat penting dalam mencukupi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat, karena itu Food Agriculture Organization (FAO) dan World Food Programme (WFP) mendorong pemerintah menyusun kebijakan peran pertanian dalam pembangunan gizi.

"Kami menyambut baik ide tersebut. Kementerian Pertanian memiliki banyak program bermanfaat mendorong pembangunan pangan dan gizi," kata Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi, saat menerima kunjungan perwakilan FAO dan WFP, diruang kerjanya, Senin (16/7).

Dalam kesempatan tersebut, Agung menjelaskan, Kementan memiliki kegiatan yang bertujuan memperkokoh ketahanan pangan dan memperbaiki gizi keluarga, diantaranya Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL/Home Garden) dan Program Bedah Kemiskinan

Rakyat Sejahtera (BEKERJA).

Kunjungan Perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste yang baru, Stephen Rudgard, serta perwakilan WFP, Saidamon Bodamaev adalah untuk memperkuat kerjasama dalam program pangan dan gizi.

Dalam pertemuan ini juga dibahas rencana keterlibatan FAO dalam peringatan Hari Pangan se-Dunia (HPS)/ World Food Day yang akan dilaksanakan Oktober 2018 di Provinsi Kalimantan Selatan.

Terkait dengan tema HPS yaitu "*Zero Hunger*", FAO mengharapkan masukan mengenai isu spesifik yang perlu diangkat.

Menanggapi hal tersebut, Agung mengusulkan isu pemanfaatan lahan, termasuk pada lahan rawa/lahan lebak dan pasang surut (swamp area), untuk ketahanan pangan serta isu ekspor pangan.

"Apa yang saya usulkan itu sangat penting, mengingat terdapat lahan lebak dan pasang surut/lahan rawa di Kalimantan, dan potensinya sangat besar dimanfaatkan untuk ketahanan pangan," jelas Agung.

Pada bagian lain, Agung menyampaikan, kerja sama FAO dan WFP dengan Kementerian/Lembaga terkait di Pemerintah Indonesia berupa Food Security Monitoring Bulletin, sudah cukup baik.

Namun demikian menurut Agung, untuk memberikan manfaat lebih banyak perlu mendapat masukan beragam untuk penyempurnaannya. Untuk itu, Buletin juga perlu disampaikan kepada seluruh Unit Kerja di Kementan.

Saat ini isu yang dibahas dalam Buletin meliputi: Iklim dan Cuaca, Ketahanan Pangan, serta Fokus Khusus yang membahas masalah pangan dan gizi sesuai isu aktual di Indonesia. ●

Direktur Bank Dunia untuk Asia Pasifik Tawarkan Kerjasama dengan Indonesia

Copenhagen-Denmark, di sela-sela acara World Food Summit "Better Food for More People", Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi melakukan Bilateral Meeting dengan Nathan M. Belete selaku Direktur World Bank untuk Asia Timur dan Asia Pasifik di Borsen-Copenhagen (30/08) waktu Denmark.

Mengawali bilateral, Agung menyampaikan bahwa KTT saat ini lebih fokus pada bagaimana negara-negara membuat rencana aksi untuk mewujudkan pangan yang lebih berkualitas, fokus negara-negara berkembang dan negara maju sudah melangkah kedepan bukan hanya peningkatan produksi saja, namun sudah mengarah ke food industry dan food safety.

Hal senada disampaikan Nathan, menurutnya food safety merupakan bagian dari ketahanan pangan. Untuk itu pihaknya, menawarkan kerjasama pengembangan food security and food safety di Indonesia.

"I need to offer this collaboration and hopefully we can discuss it as soon as possible," ujar Nathan

Agung menyambut baik rencana penawaran tersebut, dan berharap dapat segera terwujud.

"I'm most welcome, and we can meet in Jakarta as soon as possible," respon Agung.

Dalam konteks ini Agung berharap, World Bank lebih meningkatkan perannya dalam mewujudkan ketahanan pangan pada setiap level dari negara hingga level individu, khususnya nega-



ra-negara Asia Tenggara dan Asia Pasifik secara umum. Sedangkan untuk Indonesia, menurut Agung, World Bank sudah menjalin kerjasama dalam bidang pengembangan sumber daya manusia dan *highland agriculture*.

Agung berharap, dengan adanya rencana perluasan kerjasama ke arah *food security* dan *food safety* akan memperkuat sistem ketahanan pangan Indonesia. ●



Kepala BKP Kementan

Pimpin Delegasi RI dalam *World Food Summit 2018* di Copenhagen

Copenhagen - Denmark. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi memimpin Delegasi RI pada Konferensi Tingkat Tinggi/ *World Food Summit* (WFS) "*Better Food for More People*" pada 29-31 Agustus lalu di Copenhagen-Denmark.

WFS dilaksanakan di empat venue utama, yaitu di *The National Parliament*, *Bella Center*, *Bita Copenhagen*, dan *Borsen*.

Pertemuan yang dihadiri 1.096 peserta dari 56 negara ini dibuka oleh Tuan Putri Denmark, Princess Marie, dan dilanjutkan dengan diskusi panel dengan narasumber dari birokrat, politisi, pebisnis, dan NGO terkait.

Menurut Agung, KTT ***better food for***

more people diselenggarakan setiap tahun, dimulai tahun 2016 dengan fokus bahasan mengenai identifikasi tantangan global yang dihadapi, tahun 2017 fokus pada formulasi rekomendasi sebagai solusi permasalahan, dan tahun 2018 fokus pada rekomendasi dan rencana aksi.

"KTT saat ini lebih fokus pada bagaimana negara-negara membuat rencana aksi untuk mewujudkan pangan yang lebih berkualitas," ujar Agung.

Agung melanjutkan, fokus negara-negara berkembang dan maju saat ini sudah melangkah kedepan bukan hanya peningkatan produksi saja, namun sudah mengarah ke *food safety*, *food industry* dan *food healthy*.

"Kita tentu tidak mau ketinggalan,

industri makanan kita saat ini berkembang signifikan, produksi kita maksimalkan untuk mencapai target *world food basket*, dan tidak hanya itu keamanan pangan baik segar maupun olahan juga kita tingkatkan," lanjut Agung.

Kegiatan KTT *better food for more people* ditutup oleh Menteri Lingkungan dan Pangan Jakob Ellemann-Jensen 31 Agustus 2018 lalu di Borsen.

Beberapa hal yang bisa diambil Indonesia dalam pertemuan ini adalah pentingnya penguatan sistem ketahanan pangan, utamanya tentang *food safety* dan *food industry*, selain itu pertemuan WFS juga memberikan kesempatan kepada Indonesia dapat bertukar pikiran dan meningkatkan kerjasama melalui *billateral meeting*. •



Gelar Pangan Nusantara

Momentum Kembangkan Pangan Lokal Indonesia

Gelar Pangan Nusantara (GPN) 2018 yang diselenggarakan sejak 27 – 29 Juli 2018 di Balai Kartini, Jakarta mampu menarik ribuan pengunjung untuk mengetahui berbagai potensi pangan lokal Nusantara, yang dikemas dalam bentuk pameran, keragaan, talkshow dan lainnya.

GPN yang digagas Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian diikuti 100 peserta baik pemerintah pusat, daerah, BUMN, UKM dan lainnya.

“Dengan banyaknya jumlah pengunjung, kami harapkan mampu menso-sialisasikan begitu kayanya potensi bahan pangan lokal nusantara kita,” kata Kepala BKP Kementan Agung Hendriadi kepada pers di hari terakhir GPN, Minggu (29/7/2018).

“Melalui pameran, talkshow, temu bisnis dan lainnya, GPN ini juga telah merubah paradigma masyarakat da-

lam mengkonsumsi pangan, yaitu pen-ganekaragaman pangan melalui pangan beragam, brgizi seimbang dan aman,” tambah Agung.

Selama tiga hari penyelenggaraan pameran, terlihat respon cukup antusias dari masyarakat untuk mengetahui lebih jauh potensi pangan lokal dan keanekaragaman pangan yang ada di nusantara.

Melalui GPN tahun ini yang mengangkat tema “Menjadikan Pangan Lokal Nusantara Berdaya Saing Global”, telah terjadi pertukaran informasi dan promosi serta menjalin kemitraan bisnis dan pasar.

Melalui talkshow yang menghadirkan para pakar dibidangnya, pengunjung mendapatkan wawasan dan pengetahuan tentang teknologi dan pemasaran pangan lokal terkini untuk mendorong pengembangan pangan lokal yang ada.

Agung Hendriadi menuturkan bahwa rangkaian GPN bukan sekedar seremonial semata, namun dapat dimaknai sebagai usaha kita dalam rangka mempromosikan pemanfaatan dan pengembangan pangan nusantara, serta menggali peluang dan membangun kerja sama seluruh stakeholder terkait pengembangan pangan nusantara untuk dapat berdaya saing global.

“Dengan berakhirnya pelaksanaan GPN ini tidak berarti bahwa upaya kita untuk mengembangkan pangan nusantara berdaya global hanya sampai disini namun justru dapat dijadikan momentum untuk lebih mengembangkan pen-ganekaragaman pangan berbasis sumberdaya lokal,” kata Agung.

Menandai berakhirnya GPN, Agung menyerahkan hadiah pertama door-prize berupa Sepeda. “Selamat .. ya,” kata Agung. •

Gelar Pangan Nusantara Untuk Bangkitkan Potensi Pangan Lokal



Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Syukur Iwantoro resmi membuka Gelar Pangan Nusantara (GPN) 2018 di Kartika Expo, Balai Kartini pagi ini, Jum'at, (27/7). Event yang akan berlangsung pada 27 – 29 Juli 2018 ini mengusung tema “Menjadikan Pangan Lokal Nusantara Berdaya Saing Global”.

“Saya menilai kegiatan ini sangat penting dan strategis dalam rangka mempromosikan pemanfaatan dan pengembangan pangan nusantara” ujar Syukur.

Menurut Syukur, GPN juga bertujuan membuka peluang dan kerja sama seluruh stakeholder terkait pengembangan potensi pangan nusantara untuk dapat berdaya saing global.

“Penganekaragaman pangan dari sisi konsumsi dapat memperbaiki kualitas konsumsi pangan yang ditunjukkan dengan peningkatan skor Pola Pangan Harapan dari 86,0 pada tahun 2016 menjadi 90,4 pada tahun 2017” lanjut Syukur.

Pada prinsipnya penganekaragaman pangan menurut Syukur, bukan hanya penganekaragaman sumber karbohidrat, tetapi bagaimana kita mendorong konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang termasuk untuk sumber protein maupun vitamin dan mineral.

“Saya berharap acara GPN kali ini dapat membangkitkan kembali pangan nusantara sehingga mampu berdaya saing global serta peningkatan pengembangan jumlah kerjasama antara petani, dunia usaha, dan lembaga



riset” tegasnya.

Dalam kesempatan ini Syukur mengajak untuk mengembangkan dan promosikan potensi aneka pangan lokal nusantara dari seluruh daerah, sehingga dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk pangan nusantara dan terjadi perubahan mindset pola konsumsi masyarakat menuju ke arah konsumsi yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

Sementara itu Bupati Kepulauan Meranti Irwan yang juga sebagai Ketua Asosiasi Penghasil Sagu berharap agar pemerintah dapat menggandeng Bulog untuk menampung produksi sagu sehingga merangsang petani sagu untuk terus berproduksi dan memiliki nilai jual.

“Saya juga berharap pemerintah dapat memasukan sagu sebagai bahan

pangan pokok alternatif di Indonesia, sehingga sagu menjadi tuan rumah di negeri sendiri” tegas nya.

Dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan MOU pengembangan pangan lokal antara Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dengan Forum Komunikasi Kabupaten Penghasil Sagu Seluruh Indonesia (Fokus Kapassindo), Masyarakat Singkong Indonesia (MSI), Asosiasi Petani Organik Bumi Pasundan (Asetna Bunda), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPPMI), Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI).

Perhelatan Gelar Pangan Nusantara 2018 di Balai Kartini ini akan buka sampai dengan hari minggu mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 20.00 WIB. •



Bangka Belitung Gaungkan Diversifikasi Pangan

Upaya peningkatan diversifikasi konsumsi pangan masyarakat terus digalakkan pemerintah. Kali ini dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung digaungkan Gerakan Makan Sayuran, Buah, Umbi-umbian, Kacang-kacangan, dan Ayam Merawang atau yang disingkat GEMA SABUK AMANG.

Launching gerakan resmi dituangkan dalam Peraturan Gubernur Bangka Belitung No.30 Tahun 2018, disambut antusias aparat daerah dan masyarakat.

Dalam sambutannya, Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman, menghimbau kepada para pimpinan kabupaten/kota se-Bangka Belitung agar menindaklanjuti gerakan ini secara masif

di daerahnya masing-masing.

"Saya berharap gerakan ini tidak hanya di provinsi saja, tetapi semua kabupaten kota juga harus menindaklanjuti dengan kebijakan di daerah masing-masing, agar tersosialisasikan kepada masyarakat luas," ujar Erzaldi Rosman, di Kab. Bangka Tengah Kamis (9/9/2018).

Acara ini dimeriahkan dengan Gelar Pangan Daerah dan Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (LCM B2SA) tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kepala Pusat Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Tri Agustin Satriani, mewakili Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Perta-

nian dalam sambutannya menghimbau, agar gerakan dan lomba cipta menu tidak sekedar seremonial belaka.

"Yang terpenting ibu-ibu dapat mengaplikasikan menu yang beragam, bergizi seimbang dan aman ini dalam menu makan sehari-hari di rumah, bukan hanya semangat pada saat lomba saja," tambah Tri.

Lomba cipta menu B2SA tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini dimenangkan oleh tim dari Kabupaten Bangka Tengah. Kabupaten tersebut nantinya akan diikutkan dalam lomba cipta menu tingkat nasional yang akan diselenggarakan pada saat peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) bulan Oktober tahun 2018 di Kalimantan Selatan. •

BKP Kementan

Keamanan Pangan Harus Menjadi Perhatian Semua Pihak

Dalam upaya memberikan jaminan keamanan pangan, khususnya pangan segar, peranan OKKP dan OKKPD sangat penting ditingkatkan kemampuan dan kinerjanya.

"masalah keamanan pangan ini sangat penting untuk diperhatikan, sehingga harus menjadi perhatian semua pihak, ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi saat memberikan pengarahannya pada Temu Teknis Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) di Jakarta, Rabu (25/7).

"OKKP termasuk OKKPD harus mampu memaknai amanat regulasi dengan menjadikan OKKPD sebagai lembaga yang kredibel sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat" tambah Agung.

Untuk merespon hal tersebut, menurut Agung, Badan Ketahanan Pan-



gan berupaya memperbarui regulasi tentang keamanan dan mutu pangan segar.

Agung juga mengingatkan, untuk menjadi lembaga yang kredibel, kompetensi SDM sangat penting ditingkatkan untuk mendukung kinerja OKKP-D.

"Saya berharap personil yang telah dilatih dan bersertifikat agar dapat dioptimalkan kinerjanya untuk mendukung kegiatan pengawasan kea-

manan pangan, termasuk menyiapkan infrastruktur lain," tegas Agung.

Kepada semua peserta, Agung meminta kegiatan Temu Teknis dapat menyatukan pandangan dan tekad dalam mewujudkan terselenggaranya pengawasan keamanan pangan segar hasil pertanian yang efektif di wilayah Indonesia, serta meningkatkan pelayanan OKKPD berupa sertifikasi dan pendaftaran PSAT, baik untuk per-

dagangan domestik maupun memenuhi persyaratan keamanan pangan negara tujuan ekspor.

Kegiatan yang dihadiri pejabat bidang OKKP Daerah dan Keamanan Pangan pada Dinas yang menangani Ketahanan Pangan tingkat provinsi ini kemudian dilanjutkan dengan sharing pengalaman dan diskusi dalam melakukan sertifikasi, pendaftaran PSAT serta pengawasan keamanan pangan. •



“Kita punya lebih dari 100 jenis pangan sumber karbohidrat, 100 jenis kacang-kacangan, 250 jenis sayuran, dan 450 jenis buah-buahan. Kita juga masih punya potensi 10,3 juta lahan pekarangan dan 8-10 juta hektar lahan marginal namun perlu dikelola secara optimal”

// Presiden sekaligus Founding Father kita, Bpk. Ir. Soekarno saat pendirian Institut Pertanian Bogor pernah mengatakan bahwa pangan merupakan hidup matinya suatu bangsa, apabila kebutuhan pangan rakyat tidak terpenuhi maka malapetaka, oleh sebab itu perlu usaha besar-besaran, radikal, dan revolusioner, karena itu, ketahanan pangan bagian dari ketahanan nasional yang harus diupayakan bersama,” kata Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi dihadapan peserta Perangkat Kendali Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVIII Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) di Jakarta, Kamis (12/7).

Agung juga menyampaikan, potensi sumberdaya pangan Indonesia sangat kaya, namun belum banyak dimanfaatkan dengan baik.

“Kita punya lebih dari 100 jenis pangan sumber karbohidrat, 100 jenis kacang-kacangan, 250 jenis sayuran, dan 450 jenis buah-buahan. Kita juga masih punya potensi 10,3 juta lahan pekarangan dan 8-10 juta hektar lahan marginal namun perlu dikelola secara optimal,” tambah Agung.

Dengan jumlah sumberdaya yang banyak, menurut Agung, mestinya kualitas konsumsi pangan juga meningkat, namun faktanya ternyata belum.

“Isi perut sebagian besar kita masih didominasi padi-padian, lemak, minyak, dan gula, sementara konsumsi hewan-

Kepala BKP Kementan

“Perwujudan Ketahanan Pangan Tugas Seluruh Komponen Bangsa”





i, kacang-kacangan, sayur dan buah masih kurang, hal ini tercermin dari skor Pola Pangan Harapan yang belum mencapai ideal,” jelas Agung.

“Skor PPH kita saat ini baru mencapai 90,4. Kita harus tingkatkan terus, sampai nilai ideal yaitu 100, agar kualitas konsumsi naik dan kualitas sumberdaya manusia meningkat,” jelas Agung.

Indonesia, menurut Agung, merupakan salah satu negara terluas wilayahnya yang memiliki potensi lahan kering dan lahan basah cukup besar.

“Tercatat daratan Indonesia tidak kurang 190 juta hektar, dimana 145 juta hektar merupakan lahan kering dan sisanya (45 juta hektar) adalah lahan basah (rawa dan non rawa),” kata Agung.

“Dari 190 juta itu ada 80 juta hektar yang berpotensi dikembangkan, jadi kita sebenarnya masih sangat kaya untuk menghasilkan pangan yang beranekaragam” lanjut Agung.

Agung memberikan contoh berbagai

upaya yang telah dilakukan Kementerian Pertanian melalui berbagai program seperti: bantuan alat mesin pertanian, peningkatan infrastruktur air (long storage, Dam, sumur dangkal, dan sumur bor), pengembangan lahan rawa dan gambut, termasuk pengembangan varietas padi untuk lahan rawa dan lahan kering.

“Saya tegaskan bahwa tugas mewujudkan ketahanan pangan bukan semata-mata tanggungjawab kementerian pertanian. Ini adalah tugas bersama seluruh komponen bangsa, termasuk TNI-Polri,” tegas Agung.

Pemaparan Kepala BKP Kementan yang membahas masalah Kemandirian Pengelolaan Sumberdaya Pangan untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional ini, diikuti oleh 100 peserta dari TNI/Polri, Kementerian/Lembaga, NGO, dan 6 negara sahabat, yaitu perwakilan dari Arab Saudi, Fiji, Australia, Bangladesh, Laos dan Pakistan. •

“Tercatat daratan Indonesia tidak kurang 190 juta hektar, dimana 145 juta hektar merupakan lahan kering dan sisanya (45 juta hektar) adalah lahan basah (rawa dan non rawa). Dari 190 juta itu ada 80 juta hektar yang berpotensi dikembangkan, jadi kita sebenarnya masih sangat kaya untuk menghasilkan pangan yang beranekaragam”

Cadangan Beras Banyak, Untuk Apa Impor Beras?



Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Enggartiasto Lukita kembali membuka keran impor untuk komoditi beras. 1 juta ton beras impor diprediksi akan masuk dalam kurun waktu dua bulan kedepan.

Kemendag mengaku telah memberi izin impor ke Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dengan alasan stok beras minim. Benarkah demikian?

Dalam surat yang dikeluarkan oleh Perum Bulog per tanggal 9 Agustus 2018 dengan nomor B-1034/11/D0303/08/2018 lalu diketahui bahwa hingga Juli 2018 kemarin stok beras Bulog masih berada di angka 1,861.404 ton. Sekedar informasi, stok cadangan beras nasional dinyatakan aman adalah 1 - 1,5 juta ton. Surat itu langsung ditujukan kepada Menteri Koordinator

Bidang Perekonomian RI dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI.

"Stok beras CBP (Cadangan Beras Pemerintah) per akhir bulan Juli 2018 adalah sebesar 1.861.404 ton yang terdiri dari pengadaan dalam negeri sebanyak 1.331.881 ton dan eks impor 529.523 ton. Dengan stok yang dikuasai tersebut Perum Bulog siap untuk melaksanakan penugasan yang diamanahkan pemerintah," sebagaimana dikutip dalam isi surat tersebut.

Untuk mengetahui jumlah cadangan beras pemerintah yang dimiliki Bulog, Badan Ketahanan Pangan Kementerian bersama Perum Bulog terjun langsung ke lapangan mengumpulkan cadangan beras pemerintah langsung dari petani. Hasilnya cukup mengejutkan, terhitung Selasa (21 Agustus 2018) pukul 10.00

WIB, diketahui jumlah cadangan beras pemerintah meningkat hingga 2,027 juta ton atau meningkat sebanyak 166.418 ton dari bulan Juli 2018.

"Iya jumlahnya naik hanya dalam waktu satu bulan dari bulan Juli hingga Agustus 2018," ujar Kepala BKP Kementerian, Agung Hendriadi.

Tidak hanya itu. Ternyata cadangan beras pemerintah juga ada di tingkat penggilingan. Tercatat hingga 21 Agustus 2018 terdapat 1,230 juta ton beras masih tersimpan di gudang - gudang penggilingan padi baik besar, sedang atau kecil yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk Jakarta sendiri jumlah stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) diketahui mencapai 44 ribu ton.

Dengan jumlah cadangan beras pemerintah yang banyak itu, kenapa Indonesia harus impor beras lagi? •

BKP Kementan

Dorong Perum Bulog Subdivre Subang dan Subdivre Indramayu Tingkatkan Serapan Gabah

Untuk meningkatkan serapan gabah/beras (sergap) petani oleh Bulog untuk mengisi cadangan beras pemerintah, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Agung Hendriadi memimpin Rapat Koordinasi Sergap di Kantor Sub Divre Bulog Subang, Rabu (18/7).

"Pertemuan ini sangat penting untuk mempercepat serapan gabah/beras petani, sehingga bisa memenuhi target yang ditetapkan," kata Agung.

Agung yang juga Ketua I Pelaksana

“ Bantuan dryer akan diberikan untuk gapoktan yang memiliki penggilingan, dan rekomendasi dari BKP untuk diberikan kepada PUPM binaan BKP ”

Sergap menambahkan, serapan beras subdrive Subang dan Indramayu masih dibawah target harian, untuk itu perlu kerja keras mendorong pencapaian target.

Target harian Subdrive Bulog Subang 278 ton dan pencapaiannya baru 70 ton. Sedangkan subdrive Indramayu 384 ton dan pencapaiannya baru 196 ton.

Dalam rakor ini, telah disepakati antara subdrive dan mitra bulog untuk menaikkan target harian di subdrive subang sebesar 700 ton dan subdrive





indramayu sebesar 1000 ton.

Untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani, Kementerian pertanian sedang memproses pengadaan 10.000 dryer yang alokasinya ditentukan oleh dinas pertanian provinsi.

"Bantuan dryer akan diberikan untuk gapoktan yang memiliki penggilingan, dan rekomendasi dari BKP untuk diberikan kepada PUPM binaan BKP," tegas Agung.

Salah satu langkah percepatan sergap adalah mempermudah dan memperluas kerjasama pengadaan tidak hanya sebatas dengan mitra bulog.

"Semua kelompok tani/ gabungan kelompok tani/ dan penggilingan padi bisa menjadi mitra bulog," jelas Agung.

Masih menurut Agung, kelompok yang mendapat PUPM (Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat) binaan BKP,

juga dapat dilibatkan untuk menjadi mitra bulog, sehingga dapat membantu pencapaian target sergap.

Agung juga menekankan, langkah percepatan sergap sesuai kesepakatan dengan Kepala Bulog, bahwa bulog akan melakukan pengecekan di lapangan, untuk menghindari penolakan barang yang dikirim petani ke gudang bulog.

Ditekankan Agung, bahwa kewajiban kita bersama untuk membantu memenuhi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 2,2 juta ton. Besaran itu hanya kurang dari 5% total produksi beras nasional.

"Bila CBP terpenuhi sebesar 2,2 juta ton/tahun, maka tidak akan ada impor. Sesuai arahan Presiden bahwa impor baru diperbolehkan bila CBP kurang dari 1 juta ton," tegas Agung.

Sesuai hasil Rakortas Bidang Perekonomian pada tanggal 15 Januari 2018 Bulog diminta fokus menyerap beras medium di bulan Juli s/d akhir Agustus yang merupakan puncak panen raya.

Harga fleksibilitas pembelian bulog sebesar Rp. 8.030,- dijamin tetap sampai oktober 2018.

Rakor ini juga dihadiri dari TNI, yaitu Letkol Arh Nova Mahanes Yuda mewalili Aster AD, Sekretaris BKP, Kepala Divre Bulog Jawa Barat, Perwira Pembantu Madya SDAB Staf Umum Teritorial AD, Kasubdivre Subang, Kasubdivre Indramayu, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang, Purwakarta dan Indramayu, dan Mitra Bulog kabupaten Subang, Purwakarta dan Indramayu. •



Kepala BKP Kementan Dorong Bulog Kalsel dan Sulteng Percepat Serap gabah petani

“Kalimantan Selatan ini potensi panennya masih banyak, terutama pada Juli - Agustus ini. Karena itu saya mendorong bulog bisa menyerap 56.528 ton sampai akhir Agustus 2018”

Untuk mempercepat penyerapan gabah/beras petani oleh Bulog, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi memimpin langsung rapat sergap di Kalimantan Selatan (Selasa, 10/7/2018) dan Sulawesi Tengah (Rabu, 11/7/2018).

“Kalimantan Selatan ini potensi panennya masih banyak, terutama pada Juli - Agustus ini. Karena itu saya mendorong bulog bisa menyerap 56.528 ton sampai akhir Agustus 2018,” kata Agung.

“Manfaatkan momentum panen ini sebaik-baiknya agar target serapan gabah bisa tercapai,” tegas Agung.

Realisasi sergap Kalsel masih di an-

gka 5.295 ton atau 28% dari total target sergap sampai Agustus, yaitu 22 ribu ton. Sementara potensi produksi Juli-Agustus diperkirakan mencapai 300 ribu ton. Sasaran target sergap harian sebesar 918 ton.

“Bulan Juli sampai Agustus ini harus kita manfaatkan sebagai momentum menyerap gabah sebanyak-banyaknya dari petani,” tambah Agung.

Realisasi sergap di Kalsel menurut Agung, dapat terus ditingkatkan dengan mengoptimalkan kemitraan yang ada di Kalsel untuk menjual berasnya ke Bulog.

Di Sulawesi Tengah, Agung yang juga sebagai Ketua I Sergap Kementan mengatakan untuk meningkatkan sergap, perlu kerjasama semua pihak melakukan monitoring dan pengawasan setiap



harinya.

Target sergap Sulteng yang harus dicapai sampai akhir Agustus sebesar 50.000 ton, sedangkan realisasi baru mencapai 9.734 ton (22,90%). Target harian 671 ton. Potensi produksi sampai akhir Agustus 2018 sekitar 22.221 ribu ton.

Untuk mempercepat serapan gabah/beras, Gubernur Sulawesi Tengah melalui suratnya (29/6/2016) menginstruksikan agar dilakukan pemotongan beras untuk stok beras pemerintah melalui divre bulog ditingkat penggilingan sebesar 10%, dan khusus kabupaten Parigi Moutong 15%.

Dalam rakor ini para mitra Bulog yaitu penggilingan padi/gapoktan berkomitmen menjual berasnya ke bulog sebesar 10 sd 30% dari panen yang dihasilkan, sehingga target yang diharapkan bisa tercapai.

"Saya sangat menghargai komitmen para mitra bulog ini. Ini mestinya bisa diikuti mitra bulog lainnya," kata Agung.

Sebelumnya dijelaskan, tujuan ser-



gap adalah untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang disimpan di Bulog. Hal ini sesuai dengan tugas bulog untuk mengendalikan pasokan dan stabilitasi harga.

Selain itu juga untuk melindungi petani, terutama ketika harga jatuh dibawah harga pembelian pemerintah (HPP), Bulog wajib menyerap gabah petani, sehingga petani tidak dirugikan.

Diakhir acara dilakukan komitmen menjual beras ke bulog yang dibuat dalam bentuk order pembelian antara penggilingan padi/gapoktan dengan Bulog.

Hadir dikedua rakor ini antara lain Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kadis Pertanian, Kadivreg Bulog, TNI, BPTP, Perpadi dan perusahaan penggilingan padi serta gapoktan. •



Jelang Panen Raya di Sulsel, Kepala BKP Kementan: Optimalkan Serap Gabah Petani

Menjelang panen raya di Sulawesi Selatan pada akhir Juli hingga Agustus, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian Agung Hendriadi menegaskan agar Bulog mengoptimalkan serapan gabah petani.

"Puncak panen nanti, Bulog harus mengoptimalkan serapan gabah petani. Kita mendorong serap gabah harus mencapai 230 ribu ton" ujar Agung.

Hal tersebut ditegaskan Agung pada Rakor Sergap Provinsi Sulawesi Selatan pada dikantor divre bulog Sulselbar, Selasa (24/7/2018).

Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi sentra produksi padi di Indonesia. Potensi panen Juli sampai Agustus mencapai 2.4 juta ton.

Kadivreg Bulog Sulselbar, Mansur mengatakan pihaknya akan mengoptimalkan segala upaya untuk menyerap beras dari petani dalam mengisi cadangan beras pemerintah.

"Kami akan upayakan untuk menyerap beras petani," ujar Mansur.

Beberapa daerah yang berpotensi



panen pada Juli sampai Agustus antara lain Maros, Gowa, Barru, dan Soppeng.

Realisasi sergap Sulselbar hingga hari ini mencapai 176.096 ton setara beras atau mencapai 44,02% dari target sergap Sulsel sebesar 400.000 ton. Dari realisasi tersebut, untuk mencapai target, Bulog harus menyerap beras sebesar 4.711 ton per hari.

Sementara itu, Kasiter Korem 1 Toddopuli Awaluddin mengemukakan kesediaan TNI untuk membangun Bulog dalam penyerapan gabah.

"Kami TNI selalu siap mendukung pemerintah dengan menjaga agar stok beras di gudang Bulog tetap stabil." Kata Awaluddin.

Rakor dihadiri Bulog Divre Sulselbar, Dinas Pertanian Sulsel, Kepala BPTP, Korem 141 Toddopuli, dan Perpadu serta pengusaha penggilingan padi mitra bulog.

Di akhir acara, Agung mengamanatkan pentingnya sinergi lintas sektor dalam upaya mencapai target sergap sebagaimana ditetapkan. ●

Kepala BKP Kementan Pimpin Rakor Sergap di Sumatera Selatan

Dalam upaya percepatan serapan gabah petani (sergap) Kepala Badan Ketahanan Pangan, Agung Hendriadi meminta Tim Sergap untuk bekerja keras dan terus melakukan kegiatan dilapangan.

"Sampai saat ini realisasi serapan beras sub divre Bulog Sumatera Selatan baru mencapai 5.930 ton dari target 67.623 ton. Jumlah pengadaan beras harus bisa lebih tinggi lagi, dan dapat dicapai dengan kerja keras serta turun langsung ke lapangan," Ujar Agung dalam arahannya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Serap Gabah/Beras di Divre Bulog Sumatera Selatan, Selasa (17/7/2018).

"Sergap ini untuk mengisi cadangan beras pemerintah. Dan tentunya demi bangsa dan negara," tambah Agung.

Rakor Sergap juga dihadiri Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktur Pengadaan Perum BULOG, Kadivire BULOG Sumsel Babel, Sekretaris BKP, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel, Kepala BPTP Sumsel, MABESAD, Korem Palembang, Mitra BULOG Divre Sumsel, dan PERPADI Sumsel.

Dirjen PSP, Dadih Pending Permana selaku Penanggungjawab UPSUS Sumsel mengatakan, bahwa potensi produksi Juli-Agustus 2018 di Sumatera Selatan sebanyak 483.553 ton setara beras dari potensi luas panen 161.464 Ha, sehingga sangat memungkinkan untuk mendukung pencapaian target realisasi pengadaan beras sampai Agustus 2018.

Menurut Direktur Pengadaan PERUM BULOG Bachtiar, dalam upaya



penyediaan beras untuk CBP BULOG tidak bisa dilakukan sendiri, namun harus kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait seperti Kementerian Pertanian, Unsur pemerintah daerah, teritorial, swasta, masyarakat, petani dan gapoktan termasuk dengan Civitas akademika.

"BULOG juga harus melakukan perubahan mindset menuju Customer Service," ujar Bachtiar.

Dalam rakor disepakati oleh Mitra

Bulog Subdivre Palembang dan OKU bersedia memasok 1.460 Ton/hari untuk Divre Sumatera Selatan, dengan rincian 4 Mitra Bulog Palembang sebanyak 660 Ton per Hari dan 7 Mitra Subdivre OKU sebanyak 800 ton per Hari.

Faisal-Ketua PERPADI Sumatera Selatan mengharapkan adanya bimbingan dan bantuan bagi penggilingan kecil seperti bantuan drayer untuk memperbaiki kualitas beras hasil penggilingan kecil di Sumatera Selatan. ●

Kemitraan Gapoktan dan TTI Mudahkan Masyarakat Penuhi Kebutuhan Pangan

Dalam upaya mencukupi kebutuhan pangan masyarakat dengan harga terjangkau, selain dilakukan melalui peningkatan produksi pangan, juga memperpendek mata rantai distribusi pangan.

Dalam kaitan ini Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian telah melakukan pembinaan kepada 1156 Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) yang tersebar diberbagai tempat.

Selain itu juga dibangun 3.655 Toko Tani Indonesia (TTI) dan TTI Center yang saat ini berkembang di 20 provinsi.

Salah satu Gapoktan yang cukup pesat kemajuannya adalah Gapoktan Sinar Abadi yang kegiatannya meliputi penyimpanan gabah/beras, penjemuran, pengolahan serta cadangan pangan di Banjar Bongan.

Gapoktan yang berada di Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan berdiri 15 Agustus 2008 de-

ngan anggota 247 berasal dari 5 Kelompok Tani. Gapoktan ini sudah melakukan kemitraan usaha dengan 11 TTI di Bali.

Menurut Ketua Gapoktan I Ketut Sukarta, pada tahun 2016, pihaknya mendapat bantuan program usaha pangan masyarakat dari BKP Kementan sebesar Rp. 200 juta yang digunakan 140 juta untuk pembelian gabah dan 60 juta biaya operasional. Sedangkan pada tahun 2018 hanya mendapat bantuan biaya operasional.





"Bantuan tersebut sangat membantu bagi kelompok kami, untuk membeli gabah petani dan menjual berasnya ke TTI," ujar Ketut Sukarta yang ditemui, Rabu (5/9).

Menurut Ketut Sukarta, bantuan yang diterima digunakan untuk membeli gabah petani dan sebagian untuk operasional.

"Kami sudah melakukan 3 putaran pembelian gabah petani. Dan akan terus berkembang. Kami jual dengan mitra kami ke 11 TTI dengan harga Rp. 8.200,- dan TTI menjual Rp.8.500,- langsung kepada masyarakat," tambahnya.

Menurut Ketut Sukarta, pihaknya sudah memulai penjualan beras ke selain TTI dengan cara e-commerce sehingga kami dapat mengatur pengiriman barang sesuai order dari TTI.

"Bagi kami, sistem pemasaran melalui e-commerce ini merupakan lompatan besar dalam penjualan beras," ujar Pande Futu Widya, Pengelola TTI

“Tahun ini pemerintah mengadakan bantuan 1.000 dryer untuk gapoktan, agar usahanya lebih maju dan kesejahteraan petani meningkat”

Subak Bengkel.

"Melalui e-commerce kami bisa lebih cepat melayani masyarakat, bahkan omsetnya terus meningkat," tambahnya.

Menurut Pande pemasaran e-commerce sementara baru dilakukan antara gapoktan dan TTI.

"Kalau masyarakat pembeli kami hanya menggunakan komunikasi lewat handphone atau penjualan langsung,"

ujarnya.

Kelancaran distribusi pangan dengan harga terjangkau bisa dilakukannya, usaha TTI berasnya dipasok oleh Gapoktan yang menjadi mitra usahanya.

Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi yang berkunjung kelokasi merasa senang melihat kinerja gapoktan.

"Usaha gapoktan ini harus terus berjalan dan berputar membantu menyerap gabah petani dan menjual beras dengan harga terjangkau kemasyarakat," ujar Agung.

Sedangkan mengenai permintaan bantuan dryer, Agung berpesan agar Dinas Ketahanan Pangan Provinsi berkoordinasi dengan Dinas Pertanian.

"Tahun ini pemerintah mengadakan bantuan 1.000 dryer untuk gapoktan, agar usahanya lebih maju dan kesejahteraan petani meningkat," pungkas Agung yang berkunjung bersama-sama Tim BKP Kementan. •

KRPL Kementan Mampu Penuhi Kebutuhan Pangan dan Kesejahteraan Keluarga

Dalam upaya memantapkan ketahanan pangan keluarga, sejak tahun 2010 Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian telah mengembangkan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang hingga kini tersebar di 18.000 desa di 34 provinsi.

Pengembangan KRPL selain untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga, juga untuk mengurangi belanja keluarga, terutama pangan, yang akhirnya

“Kuncinya adalah adanya tambahan pendapatan atau generating income bagi setiap anggota yang mengerjakan KRPL. Kalau ada tambahan pendapatan, tentu terus semangat”

dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

Salah satu KRPL cukup pesat kemajuannya adalah yang dikembangkan

Kelompok Wanita Tani (KWT) Mertanadi di desa Tiying Gading, Kecamatan Selamadeg Barat, Kabupaten Tabanan Bali.

Walaupun KWT ini baru dibentuk Ma-



ret 2018 lalu, namun perkembangannya cukup pesat.

"Dengan KRPL yang kami kembangkan, anggota kami mampu menghemat belanja pangan untuk rumah tangga sekitar 500 ribu rupiah setiap bulannya. Jika dihitung 30 anggota, kami bisa menghemat belanja sebesar 15 juta rupiah," Ujar Ketua KWT Ni Nyoman Sukani yang ditemui di Kebun Kelompok, Rabu (5/9).

Kepala BKP, Agung Hendriadi yang berkunjung ke lokasi pun mengapresiasi kegiatan KWT ini.

"Saya mengharapkan KRPL ini tidak cepat merasa puas dan selesai sampai disini. Tapi terus dikembangkan dan berkelanjutan, sehingga benar-benar lestari," ujar Agung.

Menurut Agung, KRPL akan berkelanjutan jika ada *generating income*.

"Kuncinya adalah adanya tambahan pendapatan atau *generating income* bagi setiap anggota yang mengerjakan KRPL. Kalau ada tambahan pendapatan, tentu terus semangat," tambah Agung.

Sedangkan Kepala Pusat Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan BKP, Tri Agustin, selaku pembina KRPL, mengharapkan lahan usaha, jenis tanaman dan anggotanya terus bertambah.

"Kalau sekarang anggotanya baru 30 orang, kedepannya saya harapkan sudah bertambah menjadi 40 orang dan terus bertambah. Begitu juga dengan lahan usaha dan jenis tanaman harus bertambah banyak," ujar Tri Agustin.

KWT binaan Dinas Ketahanan Pangan Bali ini sudah melakukan panen sejak Mei sampai Agustus. Dari hasil penjualan sayuran maupun bibit tanaman, telah terkumpul sebesar 2,5 juta rupiah.

Aneka tanaman yang diusahakan adalah cabe, tomat, terong, paria, labu siam, jahe, kacang panjang dan juga memelihara itik.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bali, I Nyoman Mardiana



ana mengatakan, pihaknya akan terus mengembangkan KRPL di lokasi-lokasi lainnya.

"Melihat apa yang dihasilkan disini, nantinya juga akan kami kembangkan di daerah lainnya, sehingga ketahanan pangan keluarga semakin mantap," ujar Nyoman.

Dalam pengembangan KRPL, BKP memberikan bantuan Rp. 50 juta/KWT

untuk pembangunan Kebun Bibit Desa,

Demplot, pengembangan Pekarangan, pengembangan kebun sekolah dan sosialisasi pengolahan pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).

Bantuan diberikan sebagai stimulan untuk memotivasi masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan, dimana Indonesia memiliki potensi lahan pekarangan seluas 10,3 juta hektar. •

KRPL Kementan Hemat Pengeluaran Rumah Tangga

Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sleman Yogyakarta, Kamis (13/9), Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan), Agung Hendriadi mengajak masyarakat mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan dengan menanam sayuran.

"Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) merupakan solusi bagi pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat sekaligus efisiensi pengeluaran rumah tangga saat ini," kata Agung.

KRPL merupakan gerakan Diversifikasi pangan melalui Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan berbasis sumber daya lokal dan pelestarian sumber daya genetik melalui pengembangan Kebun Bibit Desa.

Sebagai gambaran, berdasarkan data BPS yang diolah BKP, skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi sayur dan buah baru mencapai 5,4% dari 6% yang direkomendasikan. Konsumsi masyarakat saat ini masih didominasi padi-padian, lemak, minyak, dan gula.

"Untuk meningkatkan konsumsi sayur, maka Program KRPL merupakan alternatif solusinya," jelas Agung.

"Kedepan kita akan terus mengembangkan lokasi KRPL di seluruh Indonesia," tambahnya.

Senada dengan Agung, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Yogyakarta Arofah, mengatakan pihaknya fokus mengembangkan KRPL pada lokasi-lokasi yang dianggap kekurangan akses ekonomi untuk pemenuhan pangan.

"Jumlah KRPL di Yogyakarta sudah 150-an lokasi, sedangkan di Sleman ada sekitar 47 KRPL, dan tahun 2018 sebanyak 5 lokasi," ujar Arofah.



Menurut Arofah, sebagai bentuk keseriusan program dan dukungan untuk pengentasan rentan terhadap rawan pangan, Provinsi DIY akan menambah lokasi dari APBD di masa-masa mendatang.

Ketua atau perwakilan Kelompok Wanita Tani (KWT) Tanjung Lestari, Desa Pendowoarjo, Kecamatan Sleman, Teresia Yuliani mengungkapkan kendala yang dihadapi oleh kelompok dalam pengembangan ini.

"Pertama kami kesulitan akses air untuk bibit dan kedua lokasi pembibitan relatif tidak terlalu dekat dengan pemukiman warga," ungkap Teresia.

Menanggapi hal tersebut, Agung menyarankan agar KWT sementara menggalakkan pembibitan dipekarangan rumah karena jangkauan air lebih mudah, selain itu juga meminta menambah polibag agar kebutuhan pangan tercukupi.

"Saya lihat saat ini sudah ada 30-

45 polibag di setiap pekarangan rumah. Kedepan harus ditingkatkan menjadi 75 polibag agar dampaknya lebih besar," ujar Agung.

Kepala Desa Pendowoarjo, Catur Sarjumiharta juga menyampaikan rasa syukur atas dukungan pemerintah pusat kepada warga desa atas program KRPL.

"Kami dari perangkat desa dukung penuh program KRPL ini karena sangat bermanfaat bagi warga. memang disini saat ini musim kering, tetapi warga tak menurunkan semangat menanam karena mereka butuh," kata Catur.

Agung juga menambahkan bahwa berdasarkan kajian ekonomi untuk KRPL, program ini sangat membantu ekonomi rumah tangga dalam menghemat pengeluaran Rp 750 ribu hingga Rp 1,2 juta/ rumah tangga.

"Ini harus dilanjutkan dan dikembangkan karena manfaatnya besar," pungkas Agung.

JUMLAH TOKO TANI INDONESIA TAHUN 2016-2018



Target

✓	2016	1.000	2017	1.000	2018	1.000
---	------	-------	------	-------	------	-------

Realisasi

✓	2016	1.320	2017	1.113	2018	1.222
---	------	-------	------	-------	------	-------

Jumlah TTI 2016-2018:
3.655



BADAN KETAHANAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN



BKPKEMANTAN



@BKPKementan



badanketahananpangan



BKP Kementan



SEBARAN TOKO TANI INDONESIA CENTER (TTIC) DI PROVINSI



✓ 20 Provinsi yang sudah memiliki TTIC :

- Aceh
- Sumatera Utara
- Riau
- Sumatera Barat
- Sumatera Selatan

- Lampung
- Bengkulu
- Banten
- Jawa Barat
- Jawa Tengah

- D.I. Yogyakarta
- Jawa Timur
- Bali
- Nusa Tenggara Barat
- Kalimantan Barat

- Kalimantan Selatan
- Sulawesi Selatan
- Sulawesi Utara
- Gorontalo
- Maluku Utara

✓ Komoditas yang diperjual belikan adalah pangan pokok dan komoditas strategis lain



BADAN KETAHANAN PANGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN



BKPKEMANTAN



@BKPKemantan



badanketahananpangan



BKP Kementan